

KORUPSI: SUATU KAJIAN ANALISIS DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG

Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc
Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Yenilestari24@yahoo.com

Abstract

This article analyzes the history and development of corruption in some countries, where corrupt practices are not a new problem but it has long been emerging and eternal to this day. The practice of corruption is a crucial issue for the development of a nation state, especially affecting the welfare of citizens in obtaining their rights in a prosperous and prosperous state life. This study is a reference to the increasing complexity of corrupt practices in various societies and sectors of society. Therefore, the discussion in this article examines how corruption is in developing countries and developed countries. This study found that corruption is a classic phenomenon that has occurred since a long time, starting from the period before the development of the modern world that is in the kingdom period in developing countries and in times of war in Western countries. The form of corruption practices is inseparable from human behavior that always feel dissatisfied with what they have. At the end of the study, this article explains that there is a very significant difference to corrupt practices in developing countries with developed countries, especially from the perspective of society and how to overcome corruption practices in both countries, it also explains the impact that arises in both countries corrupt practices.

Keywords : Corruption, Third Country, and First Country

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai korupsi telah lama muncul dan menjadi sebuah pembahasan yang penting dalam sistem tata negara sebuah bangsa. Hal ini menjadi sedemikian penting dikarenakan, praktik korupsi bukanlah barang baru yang didapati pada sebuah negara, melainkan telah menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan sistem ketatanegaraan negara yang berdaulat.

Sejarah telah membuktikan bahwa praktik korupsi telah jauh terjadi semenjak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma hingga saat ini. Tidak hanya terjadi pada negara-negara miskin maupun berkembang, di mana sistem politiknya belum mapan, namun negara maju dengan segudang prestasi terutama kemajuan dalam sistem pemerintahan tidak lepas dari wujudnya korupsi di lembaga-lembaga negaranya.

Kekalnya praktik korupsi di sebagian besar negara, wilayah maupun daerah tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pembangunan. Secara sosiologis, korupsi berasal dari masing-masing diri individu yang memiliki niat, peluang dan kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya guna memenuhi nafsu semata.

Pelbagai macam bentuk korupsi yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang maupun kelompok tertentu, tetapi korupsi dewasa ini telah menjelma sebagai sebuah hal yang wajar bagi sebagian besar individu maupun kelompok. Pelbagai profesi dalam dunia kerja saat ini tidak terlepas dari bayang-bayang korupsi terutama lembaga-lembaga profesi basah seperti di bidang ekonomi dan juga politik.

Praktik korupsi tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan hidup terutama dalam pemenuhan gaya hidup sebagian besar individu atau kelompok. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Asia telah menjadikan korupsi sebagai budaya, yang artinya korupsi merupakan hal yang wajar bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar sebagai pemuas nafsu mereka, hal ini jelas seperti yang terlihat dari korupsi yang dilakukan oleh Imelda Marcos yang saat itu merupakan istri dari Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos yang melakukan korupsi hanya untuk memuaskan nafsunya dalam berbelanja.

Pola-pola yang berbeda antara satu masa dengan masa lainnya telah membentuk pelbagai ragam model korupsi yang berbeda. Hal ini tentu tidak terlepas dari faktor utama pelaku korupsi yaitu manusia yang cenderung memiliki akal pikiran yang terus berkembang, sehingga menyebabkan korupsi

yang sebelumnya telah dianggap sebagai sebuah budaya menjadi semakin kuat dikarenakan telah menjelma dalam setiap sektor kehidupan masyarakat.

Bukti semakin kuatnya praktik korupsi dalam kehidupan bermasyarakat ditandai dengan munculnya beragam tipe-tipe korupsi yang saat ini dikenal dan terdapat di banyak negara. Adapun macam-macam korupsi seperti korupsi besar, korupsi kecil, korupsi birokrasi, korupsi politik, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok memainkan peran penting dalam terwujudnya pelbagai macam bentuk korupsi di dunia.

Keadaan tersebut terus berlanjut hingga kini, di mana semakin menguatnya praktik korupsi di pelbagai belahan dunia tidak terlepas dari perilaku yang terdapat pada setiap individu maupun kelompok sosial yang memiliki keinginan ataupun kesempatan untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, kajian korupsi dari segi sosiologis sangatlah penting untuk dibahas lebih mendalam dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar dari persoalan pemenuhan kebutuhan hidup yang dewasa ini memang menjadi tuntutan masyarakat luas terutama dalam era globalisasi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai permasalahan korupsi telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik di Indonesia maupun sarjana luar. Persoalan korupsi yang melanda hampir seluruh negara di dunia menjadikan kajian mengenai korupsi selalu menarik untuk dikaji lebih jauh lagi.

Kajian mengenai korupsi telah lama dilakukan oleh para sarjana, seperti kajian yang dilakukan oleh Robert Klitgaard dengan judul *Controlling Corruption* yang dipublikasikan pada tahun 1988 oleh *The Regent of the University of California*. Kajian Klitgaard mengenai korupsi banyak berfokus kepada praktik korupsi yang marak terjadi di negara-negara Asia seperti Philipina, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Selain itu, Klitgaard juga fokus membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir praktik korupsi pada sebuah negara.

Klitgaard menekankan kepada penentuan sasaran-sasaran yang melakukan korupsi yang dibagi kedalam dua kategori yaitu korupsi eksternal dan korupsi internal. Penting ditekankan oleh Klitgaard untuk membasi korupsi maka langkah awal yang perlu dilakukan ialah menilai jenis korupsi, kemudian membuat analisa mengenai kerugian dan akibat yang ditimbulkan dari praktik korupsi yang terjadi pada sebuah negara.¹

¹ Robert Klitgaard. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 17-27

Pemetaan terhadap jenis korupsi yang sedang terjadi memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat guna memberantas korupsi. Adapun kebijakan umum yang diuraikan oleh Klitgaard untuk membasmi korupsi ialah memilih pegawai, mengubah sistem *reward and punishment*, mengumpulkan informasi berkaitan dengan hubungan kerja antara atasan dan pegawai, mengatur ulang hubungan atasan dan pegawai melalui sistem rotasi kerja, dan mengubah pandangan serta sikap pegawai terhadap korupsi.

Kebijakan terhadap pemberantasan maupun pengendalian korupsi harus diikuti dengan kebijakan untuk melawan korupsi itu sendiri melalui pembentukan sebuah lembaga atau komisi serta penguatan peran aparat sipil dalam memberantas korupsi. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi seringkali melibatkan peran polisi yang juga dibantu dengan badan antikorupsi, namun begitu timbulnya pro-kontra terhadap peran kedua-dua lembaga tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi negara untuk menegaskan kembali peran kedua-dua lembaga dalam pemberantasan korupsi sehingga tidak terjadi dualisme kekuasaan dalam penanganan terhadap pelaku korupsi.

Jon S.T. Quah dalam karyanya yang berjudul *Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream* pada tahun 2013 mengkaji mengenai pelbagai permasalahan korupsi yang terjadi di negara-negara Asia meliputi Jepang, India, Philipina, Taiwan Singapura, Hong Kong, Thailand, Korea Selatan, Indonesia, dan Mongolia fokus kepada upaya untuk menganalisis penyebab, konsekuensi, pola kontrol korupsi dan kemungkinan untuk membatasi tindakan korupsi pada negara-negara tersebut.

Korupsi pada negara-negara di wilayah Asia merupakan masalah yang serius dimana skandal korupsi menjadi trending topik dalam setiap pemberitaan di media massa. Quah mendefinisikan korupsi dengan mengambil pendapat dari Arnold J. Heidenheimer yang mengklasifikasikan korupsi ke dalam tiga bentuk yaitu *public-office-centered*, *market-centered*, and *public-interest-centered*.²

Public-office-centered mendefinisikan korupsi berfokus kepada keadaan dimana penyimpangan dari norma yang mengikat kewajibannya. Korupsi *market-centered* diartikan sebagai pergeseran penekanan dari kantor publik ke

²Jon S. T. Quah. 2013. *Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream*. Singapore: Fabulous Printers Pte Ltd. Page: 8-11.

pasar, sedangkan korupsi *public-interest-centered* diartikan sebagai sebuah erosi dalam kepentingan publik.

Quah selanjutnya mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi ke dalam beberapa kategori.

1. Gaji yang rendah atau gaji yang tidak memadai. Hal ini diperkuat dengan pendapat Palmier yang berhasil mengidentifikasi bahwa rendahnya gaji pegawai merupakan penyebab penting terjadinya praktik korupsi.

Rendahnya tingkat gaji yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi terlihat dari kasus yang terjadi di Mongolia, dimana banyak dijumpai pegawai negeri dan pemimpin politik melakukan korupsi. Hal ini ditunjukkan melalui data mengenai jumlah pendapatan yang diterima, seperti pendapatan bulanan presiden sebesar US\$71 pada tahun 1998 menjadi US\$761 pada tahun 2010, namun jumlah tersebut masih jauh di bawah standar gaji internasional seorang presiden. Gaji yang diterima oleh pegawai publik di Mongolia merupakan gaji di bawah standar internasional yang bahkan tidak mampu untuk memenuhi kenaikan biaya hidup di Mongolia.

2. Penyebab korupsi yang kedua ialah adanya kesempatan untuk melakukan korupsi dan *Red Tape*. Korupsi dalam hal ini berkaitan dengan sektor administrasi publik yang didalamnya terdapat birokrasi yang cenderung korup dikarenakan adanya sistem administrasi yang kurang bijaksana sehingga menciptakan regulasi terhadap akses barang dan jasa seringkali dieksploitasi bagi kepentingan individu maupun kelompok melalui praktik *rent-seeking*.

Di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Donald P. Warwick menemukan hal menarik yang dilekatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang dibagi kedalam lembaga "basah" dan lembaga "kering". Yang dimaksud sebagai lembaga "basah" ialah agensi-agensis pemerintahan yang memiliki peluang terkorup karena besarnya peluang terjadi korupsi dalam agensi tersebut seperti di sektor pajak, imigrasi, pendapatan internal, dan kepolisian. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga "kering" meliputi agensi-agensis pemerintahan yang intensitas interaksi dengan publik cenderung sedikit yaitu seperti di sektor penelitian dan departemen administrasi.

-
3. Penyebab ketiga terjadinya korupsi ialah rendahnya risiko pendeteksian dan hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena sebagian besar negara-negara Asia menganggap bahwa korupsi adalah perbuatan yang ilegal namun berbanding terbalik dengan sikap mereka terhadap praktik korupsi yang terkesan dibiarkan melalui regulasi hukuman yang cenderung tidak sesuai dengan perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara.
 4. Penyebab korupsi selanjutnya di negara-negara Asia ialah karena faktor kebudayaan orang Asia yang cenderung melihat korupsi sebagai sebuah kebudayaan yang dianggap wajar terjadi. Di Thailand, pemberian hadiah kepada pegawai publik tidak dianggap sebagai korupsi melainkan dikenal dengan istilah *sin nam jai* atau pemberian hadiah sebagai niat baik, selain itu masyarakat Thai juga mengklaim bahwa selama tidak menyakiti orang lain itu bukanlah bentuk dari praktik korupsi sehingga penerimaan masyarakat Thai terhadap toleransi dalam pemberian hadiah yang sebenarnya termasuk kategori korupsi menjadikan praktik korupsi di kalangan pegawai publik, pemimpin militer, dan politisi merupakan hal yang wajar.
 5. penyebab terkahir terjadinya korupsi menurut Quah ialah kurangnya niat politik yang baik untuk membatasi terjadinya praktik korupsi. Dalam mengurangi tingkat korupsi sebuah negara maka komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi harus serius baik melalui pembentukan lembaga antikorupsi maupun melalui regulasi yang berat terhadap pelaku korupsi.

Konsekuensi dari terjadinya praktik korupsi menurut para pakar sangat beraneka ragam, hal itu dapat terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Konsekuensi Korupsi menurut Ahli

Ahli	Konsekuensi
Nathaniel H. Leff	Korupsi birokrasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, memberikan insentif untuk memobilisasi birokrasi, meningkatkan investasi asing,

	menstimulasi inovasi ekonomi, dan meningkatkan kompetisi diantara pengusaha.
Mark Bannister	Korupsi adalah virus pembunuh karena korupsi membunuh potensi bagi pembangunan dengan cara menakut-nakuti investor, menyebabkan marginalisasi internasional, membatasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya transaksi ekonomi, penyalahgunaan dana publik, merongrong kebijakan publik dan melemahkan pemerintahan.
Mansoor Ahmad	Korupsi akan memakan semua dana pembangunan
William K. Black	Korupsi menyebabkan jutaan kematian yang sia-sia, padahal uang yang dikorupsi dapat digunakan untuk menjaga dan mengelola negara-negara miskin yang tidak berkompeten dalam bidang pembangunan.
Barry Bearak	Korupsi menyebabkan angka kematian wanita dan anak-anak di negara miskin meningkat karena munculnya wabah kelaparan, penutupan pusat pendidikan dan kesehatan terutama meningkatnya wabah penyakit mematikan di negara miskin yang diakibatkan dari penyalahgunaan dana publik

Sumber: Hasil susunan penulis

Penyebab korupsi pada dasarnya menimbulkan efek negatif terhadap pembangunan sebuah negara, oleh karena itu banyak negara yang mulai fokus untuk memberantas korupsi melalui penerapan pola-pola yang dianggap efektif bagi memerangi praktik korupsi di negara mereka.

Tabel 2.
Pola Pengendalian Korupsi di beberapa Negara

Pola	Negara	Metode
I	Jepang	Penetapan undang-undang dan membentuk tim pemberantasan korupsi dari tubuh lembaga-lembaga publik yang sifatnya independen.

II	India, Philipina dan Taiwan	Penetapan undang-undang dan membentuk lembaga anti korupsi yang independen serta pembentukan sebuah lembaga khusus yang menangani sistem pelayanan publik seperti <i>Ombudsman</i> .
III	Singapura, Hong Kong, Thailand, Korea Selatan, Indonesia, dan Mongolia	Sangat bergantung kepada undang-undang pemberantasan korupsi dan melalui undang-undang tersebut dibentuklah lembaga-lembaga anti korupsi untuk mengimplementasikan amanat dari undang-undang pemberantasan korupsi

Sumber: Hasil susunan penulis

5. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui sumber-sumber data yang berasal dari buku, artikel dan jurnal yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan praktik korupsi yang terjadi di negara maju yaitu Singapura dengan negara berkembang yaitu Philipina.

Teknik analisa data dilakukan setelah penulis mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tentang praktik korupsi di kedua-dua negara yang dimaksud. Susunan data yang telah lengkap kemudian diekplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan persoalan yang dikaji.

6. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Praktik korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang terdapat pada sebagian besar sistem pemerintahan sebuah negara, terutama di negara-negara dunia ketiga. Praktik korupsi di negara dunia ketiga bahkan dianggap sebagai suatu budaya yang telah turun temurun bahkan menjadi tradisi bagi segolongan masyarakat.

Korupsi secara etimologis berasal dari kata “korup” yang memiliki arti buruk, rusak, buruk dan dapat disogok. Dalam bahasa asing istilah korupsi sudah sangat populer seperti Bahasa Latin *corrumpere* dan *corruptio*, Bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, Bahasa Belanda yaitu *corruptie* atau *korruptie*, dan Bahasa Arab yang menggunakan istilah *rishwah* yang berarti penyuapan.

Robert Klitgaard menyatakan bahwa definisi dasar korupsi ialah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.³ Definisi yang diuraikan oleh Robert Klitgaard menunjukkan bahwa praktik korupsi dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga merugikan masyarakat.

Korupsi menurut Sarifuddin Sudding diartikan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki moral individu, politik, moral kemanusiaan dan moral kultural serta korupsi merupakan kejahatan mal-administrasi, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengambil secara melawan hukum keuangan negara atau daerah untuk kepentingan individu maupun kroni.⁴

Korupsi di pelbagai negara memiliki konsep dan arti yang secara umum sama, namun seringkali praktik korupsi ditangani atau dipandang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hal inilah yang kemudian menciptakan sudut pandang dan dampak yang berbeda antar negara, terutama sangat jelas terlihat dari kemunculan praktik korupsi di negara maju dan negara berkembang, sehingga untuk memudahkan analisa terhadap hal tersebut penulis akan mengambil negara Singapura yang mewakili negara maju dengan negara Philipina yang mewakili negara berkembang sebagai unit kajian untuk memperjelas perbedaan praktik korupsi di negara maju dan berkembang.

³Robert Klitgaard. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁴Sarifuddin Sudding. 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Education.

a.Singapura

Singapura merupakan negara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya tepatnya di Asia Tenggara. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, Singapura merupakan satu-satunya negara maju yang ditandai sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan terdepan di dunia dan merupakan negara kosmopolitan yang sangat sibuk dengan kehidupan perdagangan dan transaksi keuangan internasional.

Singapura merupakan negara Republik Parlemerter dengan sistem pemerintahan Parlemerter Unikameral Westminster. Sejak 1959 Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang dikenal sangat tegas dalam memberantas praktik korupsi di Singapura, sehingga walaupun Singapura merupakan negara kecil di wilayah Asia Tenggara namun berkat kepemimpinan yang cenderung otoritatif dari Lee Kuan Yew mampu mengantarkan Singapura menjadi salah satu negara yang disegani di dunia.

Korupsi di Singapura telah terjadi semenjak pemerintahan kolonial Inggris, namun hal ini tidak terekspos secara luas ke permukaan umum dikarenakan kebijakan untuk memindahkan bahkan memecat pegawai yang terbukti melakukan korupsi. Korupsi pada masa ini terjadi diakibatkan demoralisasi pegawai negara yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, secara khusus penyebab munculnya korupsi di Singapura dikarenakan adanya perjudian terlarang yang tumbuh subur di sektor kepolisian dan adanya asumsi yang menyatakan suap menyuap adalah hal yang wajar.

Praktik korupsi semakin subur di Singapura karena munculnya pelbagai persoalan, yaitu rendahnya gaji pegawai negeri menyebabkan meningkatnya angka korupsi, munculnya peluang bagi terlaksananya praktik korupsi, rendahnya risiko deteksi dan hukuman dari perbuatan korupsi, faktor kultural yang menganggap suap menyuap adalah hal yang wajar, dan kurangnya niat politik untuk memberantas korupsi. Hal ini terus berlanjut paska pemerintahan kolonialisme Inggris berakhir di Singapura.

Semakin meningkatnya praktik korupsi di Singapura paska pemerintahan kolonialisme Inggris semakin menggerogoti sistem pemerintahan Singapura masa kini, dibarengi dengan upaya Lee Kuan Yew untuk menjadikan Singapura sebagai negara maju maka kebijakan utama yang dikeluarkan oleh Lee Kuan Yew adalah memberantas bersih praktik korupsi yang dapat mengganggu cita-cita kemapanan negara Singapura.

Tercapainya sistem perekonomian yang maju dan mapan tidak terlepas dari keberhasilan untuk menjadikan warga negara Singapura dan

pemimpinnya sebagai sosok yang taat hukum sehingga pembagian hak dan kewajiban dapat dilaksanakan sesuai dengan tempatnya. Diawali dengan membentuk lembaga antikorupsi di tubuh kepolisian yang ternyata tidak mampu untuk memerangi korupsi karena rendahnya gaji polisi menyebabkan mereka juga cenderung terseret praktik korupsi, hingga akhirnya lahirlah sebuah lembaga antikorupsi yang sangat independen dan telah terbukti kinerjanya dalam memberantas korupsi yaitu *Corruption Practices Investigation Bureau* (CPIB).

CPIB berdiri sekitar tahun 1950-an sebagai sebuah lembaga antikorupsi yang sangat kuat karena lahirnya CPIB dilatarbelakangi oleh kehadiran Undang-undang Pencegahan Korupsi yaitu *Prevention of Corruption Act* (PCA). Keberadaan CPIB semakin populer, dikarenakan selain menangani kasus-kasus korupsi besar ditubuh pemerintahan, CPIB juga menangani kasus korupsi kecil serta kasus korupsi di sektor swasta sehingga mendapatkan apresiasi yang positif dikalangan masyarakat Singapura.

CPIB Singapura berfungsi sebagai lembaga antikorupsi yang menerima dan berwenang melakukan investigasi terhadap praktik korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta. Pejabat-pejabat pemerintahan yang terindikasi melakukan korupsi akan ditindak secara tegas oleh CPIB, hal ini dapat terjadi karena semenjak pemerintahan Lee Kuan Yew, *political will* yang tinggi untuk memberantas korupsi di Singapura benar-benar dijalankan dan diberlakukan secara efektif tanpa memandang bulu.

Independensi CPIB terpelihara dengan sangat baik melalui PCA, sehingga pemberantasan korupsi dari level rendah hingga tinggi, dari jumlah yang minim hingga jumlah yang fantastis kesemuanya merupakan wewenang dari CPIB untuk menindaknya. Hal tersebut dapat terjadi juga dikarenakan adanya sistem informasi mengenai harta kekayaan penduduk Singapura yang dapat di akses dengan mudah oleh CPIB dan hal tersebut adalah hal yang legal.

Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi, Singapura mengaplikasikan langkah-langkah yang diuraikan oleh Klitgaard. Yaitu pertama mengubah sistem *reward and punishment*, dengan cara memberikan surat pujian dan kenaikan pangkat kepada pegawai negara yang berprestasi sedangkan segi hukuman yang diterapkan yaitu pemberian sanksi administratif yang berkaitan dengan masa depan dan karir jabatan seorang pegawai.

Pengumpulan informasi menjadi langkah kedua yang diterapkan Singapura untuk menangani kebijakan pemberantasan korupsi dengan cara mengumpulkan informasi selengkap dan seakurat mungkin informasi tentang

jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang warga negara Singapura. Informasi yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai bahan untuk memanggil warga bersangkutan sehingga dapat memberikan klarifikasi mengenai informasi kekayaan tersebut.

Langkah kebijakan yang ketiga ialah menyusun kembali hubungan *patron-client* antara pegawai dan atasan. Penyusunan kembali hubungan atasan dan bawahan dilakukan dengan cara merotasi karyawan atau atasan dalam sebuah divisi ke divisi lain secara berkala, sehingga hubungan kerja yang akan tercipta cenderung selalu diperbaharui dengan hubungan kerja yang baru dan lebih kondusif hal ini meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi.

Langkah kebijakan keempat yang dilakukan oleh Singapura untuk mengurangi dan memberantas praktik korupsi ialah dengan mengubah sikap pandangan masyarakat mengenai praktik korupsi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan dan mengeluarkan pesan-pesan moral kepada lembaga/instansi pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan masyarakat umum mengenai himbauan terhadap bahaya korupsi.

Singapura sebagai negara kecil dengan perekonomian yang belum kondusif pada awalnya telah melakukan upaya-upaya konkrit untuk memberantas korupsi sebagai solusi untuk menciptakan negara Singapura yang maju dan mapan seperti sekarang ini. Keberhasilan Singapura sangat ditentukan dengan keseriusan pemerintah dan warga negara Singapura untuk memberantas korupsi melalui upaya keterbukaan informasi mengenai jumlah harta kekayaan yang dapat diakses secara luas oleh khalayak ramai terutama CPIB.

b. Philipina

Philipina merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di Lingkar Pasifik Barat bersebelahan dengan Indonesia dan Malaysia. Philipina juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil padi terbesar di dunia selain Thailand dan Indonesia, namun begitu perekonomian Philipina termasuk sangat rendah dan lemah dikarenakan meluasnya praktik korupsi di sana.

Permasalahan korupsi yang melibatkan birokrasi di Philipina telah menjadi persoalan yang sangat serius semenjak tahun 1950-an. Korupsi di Philipina telah merasuki segala lapisan birokrasi, mulai dari pegawai level rendah hingga level presiden, hal ini disebabkan oleh rendahnya gaji pegawai serta perilaku korupsi yang dianggap sebagai hal yang wajar.

Penyebab terjadinya korupsi di Philipina didorong oleh beberapa faktor, pertama rendahnya gaji pegawai dan pemimpin politik. Rendahnya tingkat gaji

para pegawai, menyebabkan pegawai publik di Philipina cenderung melakukan praktik korupsi kecil seperti melakukan pungutan liar, bahkan pada sebagian profesi seperti tenaga kesehatan yang mempertimbangkan kecilnya gaji di Philipina lebih memilih bekerja di luar negeri, hal ini menyebabkan pada daerah-daerah pinggiran Philipina sangat kekurangan tenaga medis.

Penyebab kedua meningkatnya korupsi di Philipina dikarekan sistem *Red Tape* yang menyebabkan tidak efisiennya kinerja pegawai publik sehingga meningkatkan peluang terjadinya praktik korupsi. Birokrasi di Philipina cenderung berbelit-belit atau harus melalui prosedur yang sangat panjang, hal ini pula yang kemudian menyuburkan praktik *rent-seeking* di kalangan birokrat dan pengusaha.

Rendahnya risiko deteksi dan hukuman dari praktik korupsi menjadi penyebab suburnya korupsi di Philipina. Hal ini jelas terlihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarga Presiden Marcos, di mana hukuman yang diberikan kepada Marcos dan istrinya dinilai oleh sebagian besar publik sebagai hukuman yang ringan hal ini berbanding terbalik dengan kerugian besar yang ditimbulkan oleh keluarga tersebut terhadap pendapatan negara pada masa tersebut.

Faktor kultural selanjutnya menjadi penyebab kelima suburnya praktik korupsi di Philipina. Pemberian hadiah di Philipina dianggap sebagai nilai kelompok yang dianggap sebagai kewajiban dan diterima sebagai sebuah kebudayaan turun temurun oleh warga Philipina, selanjutnya nepotisme di kalangan birokrasi Philipina juga turut subur karena adanya praktik merit.

Penyebab selanjutnya ialah kurangnya *political will* di kalangan pemimpin negara Philipina, bahkan presiden pun terjerat oleh kasus korupsi. Hal ini menandakan seriusnya permasalahan korupsi yang menggerogoti kedaulatan di negara Philipina. Rendahnya *political will* di Philipina dikarenakan tidak adanya monitoring terhadap desentralisasi kekuasaan, ketidakmampuan pejabat dan pegawai publik dalam menangani konflik kebutuhan barang dengan jumlah masyarakat yang memerlukan kebutuhan tersebut, tidak adanya hukuman yang setimpal terhadap kegagalan sistem birokrasi, hukum yang tidak adil, dan ketiadaan sosok yang mampu menjadi panutan untuk memberantas korupsi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Philipina telah lama dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Pembentukan pelbagai regulasi dan lembaga antikorupsi di Philipina telah ada sejak tahun 1950 hingga 2001 silam, segala upaya tersebut masih meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat panjang bagi pemerintahan Philipina masa kini.

Tabel 3.
Lembaga Pemberantasan Korupsi di Philipina

Presiden	Lembaga Antikorupsi	Periode
Quirino	<i>Integrity Board</i>	May-November 1950
Magsaysay	<i>Presidential Complaints and Action Committee</i>	Desember 1953-Juli 1958
Garcia	<i>Presidential Committee on Administrative Performance Efficiency</i>	Juli 1958-desember 1961
	<i>Presidential Anti-Graft Committee</i>	Februari 1960-Desember 1961
Macapagal	<i>Presidential Anti-Graft Committee</i>	Januari 1962-Januari 1966
Marcos	<i>Presidential Agency on Reforms and Government Operations</i>	Januari-September 1966
	<i>Presidential Complaints and Action Office</i>	September 1966-Oktober 1967
	<i>Presidential Agency on Reforms and Government Operations</i>	Oktober 1967-Februari 1970
	<i>Complaints and Investigations Office</i>	Februari 1970-Februari 1986
	<i>Special Cabinet Committee in Backsliding</i>	Oktober 1973-Februari 1986
	<i>Tanodbayan (Office of the Ombudsman)</i>	Juli 1979-April 1988
Aquino	<i>Tanodbayan (Office of the Ombudsman)</i>	Mei 1988
	<i>Presidential Commission on Good Government</i>	Februari 1986-sekarang
	<i>Presidential Committee on Ethics and Accountability</i>	Februari 1986-1988
Ramos	<i>Presidential Commission Against Graft and Corruption</i>	Februari 1994-Juni 2000
Estrada	<i>Inter-Agency Anti-Graft Coordinating Council</i>	Agustus 1999- sekarang

	<i>Presidential Committee on Effective Governance</i>	Oktober 1999- sekarang
	<i>National Anti-Corruption Commission</i>	Juli 2000-April 2001
Arroyo	<i>Presidential Anti-Graft Committee</i>	April 2001-November 2010
	<i>Governance Advisory Council</i>	Juli 2001-sekarang

Sumber: Jon S.T. Quah. 2013.

Pelbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Philipina terus dikembangkan dan revisi baik dari segi regulasi maupun praktiknya hingga kini. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Philipina sebagai negara yang bebas korupsi, pada tahun 2010 di bawah kepemimpinan Arroyo, ia terus fokus dan berkomitmen untuk menghapuskan korupsi di Philipina.

7. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan yang sangat besar antara pemberantasan korupsi di negara maju dan berkembang. Perbedaan mendasar terletak pada kegigihan dan ketegasan seorang pemimpin dan rakyatnya untuk benar-benar fokus membasmi korupsi, hal ini juga tentunya didukung dengan peran *political will* yang tinggi. Tanpa *political will* yang serius maka tidak akan mudah untuk mencapai negara bebas korupsi.

Singapura sebagai negara kecil di wilayah Asia Tenggara mampu mewujudkan hal tersebut, dikarenakan usaha keras Lee Kuan Yew beserta masyarakat Philipina yang berkomitmen secara tegas membersihkan korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan mereka terutama melalui keterbukaan informasi dalam pelaporan harta dan daftar kekayaan masyarakatnya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap program pemerintah Singapura.

Lain halnya dengan Philipina, yang pada masa kolonialisme merupakan salah satu negara yang maju di Asia Tenggara harus tergeser kepada perekonomian yang lemah diakibatkan membudayanya praktik korupsi di kalangan pegawai. Terpeliharanya korupsi hingga menjadi kebudayaan di Philipina tidak terlepas dari peran warga negara yang menganggap bahwa pemebrian hadiah dan nepotisme bukanlah hal ilegal.

8. DAFTAR PUSTAKA

- AanRukmana. 2010. Korupsi di Indonesia dalam lintas sejarah. Dlm. Ridwan Zachrie dan Wijayanto (pnyt.). *Korupsi mengorupsi di Indonesia: sebab, akibat dan prospek pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adnan TopanHusodo. 2011. *Evaluasi dan roadmap penegakan hukum 2012-2015*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Boni Hargens & Max Regus. 2013. *Bosisme politik: memahami kebuntuan demokratisasi lokal di Indonesia*. t.tp. t.pt.
- HerdiSahasrad. 2009. *Century gate: refleksi ekonomi-politik skandal bank century*. Jakarta: Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru dan LSIKJon S. T. Quah. 2013. *Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream*. Singapore: Fabulous Printers Pte Ltd.
- KuskridhoAmbardi. 2008. *The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin*. The Ohio State University: dissertation
- Melnyk, Mykola. 2009. *Political corruption: essence, factors, countermeasures*. *National security and defence journal* Nuber 7: 67-72.
- Robert Klitgaard. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saldi Isra & Edd O.S. Hiariej. 2009. *Perspektif pemberantasan korupsi di Indonesia*. Dlm. Ridwan Zachrie dan Wijayanto (pnyt.). *Korupsi mengorupsi di Indonesia: sebab, akibat dan prospek pemberantasan*, hlm. 553-603. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarifuddin Sudding. 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Slater, Dan. 2004. *Indonesia's accountability trap: party cartels and presidential power after democratic transition*. *Research library* No. 78: 61.
- Slater, Dan. 2006. *The ironies of instability in Indonesia*. *Berghahn Journal* Volume 50, issue 1: 208-213.